

Nomor : PS.08.03/G/406/2025

18 Mei 2025

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Hasil Pemantauan Penyampaian LHKAN
(SPT Tahunan dan e-LHKPN) Tahun 2025 di
Lingkungan Kementerian Kesehatan

Yth. (sesuai daftar lampiran 1)

Sehubungan adanya Surat Edaran Menteri PANRB No. 2 Tahun 2023 hal Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dalam rangka meningkatkan integritas dan komitmen seluruh Aparatur Negara dan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan, berikut disampaikan hasil Pemantauan Penyampaian LHKAN (SPT Tahunan dan e-LHKPN) Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Kesehatan per 24 April 2025 pukul 15.00 WIB sebagai berikut :

1. Inspektorat Jenderal telah mengirimkan surat kepada seluruh satuan kerja untuk dapat menyelesaikan Penyampaian LHKAN untuk Tahun 2025 yakni :
 - a. Surat Inspektur Jenderal No. PS.08.03/G/1438/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Pemberitahuan Pengisian SPT Tahunan dan e-LHKPN Tahun 2024 (Lapor Tahun 2025) di Lingkungan Kementerian Kesehatan agar dapat diselesaikan paling lambat 31 Januari 2025;
 - b. Surat Inspektur Jenderal No. PS.08.03/G/269/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Hasil Pemantauan Penyampaian LHKAN (SPT Tahunan dan e-LHKPN) Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Kesehatan s.d 19 Maret 2025 yang menginformasikan bahwa seluruh ASN Kemenkes agar menyelesaikan kewajiban melaporkan harta kekayaan serta menyampaikan kepada Inspektorat Jenderal paling lambat 31 Maret 2025;
 - c. Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal No. PS.08.03/G.I/901/2025 tanggal 15 April 2025 tentang Penyelesaian Penyampaian LHKAN (SPT Tahunan dan e-LHKPN) Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang menginformasikan agar seluruh Unit Eselon I dan II agar menyampaikan data terakhir penyampaian LHKAN Tahun 2025 dari Unit Kerja masing-masing kepada Inspektorat Jenderal paling lambat 20 April 2025;
2. Pemantauan dilakukan terhadap 56.967 ASN Kemenkes (Menteri Kesehatan, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, PNS, CPNS, dan PPPK) berdasarkan data dari SIMKA Biro OSDM Kemenkes per tanggal 31 Desember 2024.
3. Hasil koordinasi antara Unit Kerja dan Tim Inspektorat Jenderal, diketahui jumlah ASN Kemenkes turun menjadi sebanyak 56.265 orang, dikarenakan adanya ASN Kemenkes yang pensiun, diberhentikan, mutasi antar instansi, dalam proses pemberhentian dan meninggal dunia.

4. LHKAN Kementerian Kesehatan telah disampaikan kepada Kementerian PAN RB dengan Surat Sekretaris Jenderal No. PS.08.03/A/1266/2025 tanggal 29 April 2025 perihal Rekapitulasi Penyampaian LHKAN dengan capaian kepatuhan 98,36%. Capaian ini berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan 24 April 2025 pukul 15.00 WIB, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah seluruh Aparatur Negara	56.265
	a. Wajib LHKPN	1.977
	b. Tidak Wajib LHKPN	54.288
2	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	1.977
3	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	-
4	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	53.365
5	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	923
6	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	923

5. Tim Inspektorat Jenderal telah melakukan verifikasi dan identifikasi untuk Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan, dan diketahui beberapa permasalahan yaitu:

No	Permasalahan	Jumlah	Rincian
1.	Sakit	5	-
3.	Pegawai dengan permasalahan dalam pelaporan pajak	16	Masalah dalam EFIN, belum memiliki akun NPWP, lapor SPT gabung dengan suami
4.	Tanpa Keterangan	902	
Total		923	

6. Adapun daftar nama Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan s.d 24 April 2025 dapat dilihat pada <http://link.kemkes.go.id/NonWLLHKPNBelumSPTTahun2025> dan kepatuhan penyampaian LHKAN Tahun 2025 s.d 24 April 2025 tingkat Eselon I, II dan UPT dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3.
7. Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah, capaian LHKAN 100% merupakan salah satu syarat unit kerja dapat diusulkan untuk dilakukan evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sehingga hasil monitoring sebagaimana terlampir dalam surat ini menjadi salah satu pertimbangan Unit Kerja dapat dilakukan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

8. Bersama ini mohon Saudara menugaskan SPI/SKI/petugas yang ditunjuk di lingkungan Unit Kerja masing - masing agar:
- Memastikan setiap pegawai di seluruh Eselon II dan Satuan Kerja agar patuh dalam melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN dan SPT Tahunan serta memproses hukuman disiplin bagi pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - Melakukan monitoring secara berkala terhadap Wajib Laporkan LHKPN yang memiliki status “Perlu Perbaikan” dan “Sudah Diperbaiki”, untuk segera melengkapi dan memperbaiki data laporannya.
 - Untuk data serta materi lebih lanjut mengenai pemantauan LHKAN Kemenkes Tahun 2025 dapat diakses pada link <https://link.kemkes.go.id/multi/Links/lists/MonitoringLHKAN2025Kemkes>.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal Kemenkes,



Murti Utami

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan
4. Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan
5. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan
6. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



Lampiran 1

Nomor : PS.08.03/G/406/2025

Tanggal : 18 Mei 2025

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan
3. Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit
4. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
5. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
6. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Sekretariat Jenderal

8. Kepala Biro Umum
9. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
10. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
11. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
12. Kepala Biro Hukum
13. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
14. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
15. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
16. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
17. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
18. Kepala Pusat Kesehatan Haji
19. Kepala Pengembangan Kompetensi Aparatur
20. Pusat Pembiayaan Kesehatan

Inspektorat Jenderal

21. Sekretaris Inspektorat Jenderal
22. Inspektur I
23. Inspektur II
24. Inspektur III
25. Inspektur IV
26. Inspektur Investigasi

Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan

27. Sekretaris Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
28. Direktur Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan
29. Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi
30. Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi
31. Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
32. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan
33. Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta
34. Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Makassar
35. Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Medan
36. Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya
37. Kepala Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
38. Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas

39. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
40. Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga
41. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan
42. Direktur Direktorat Promosi Kesehatan Dan Kesehatan Komunitas
43. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer
44. Direktur Fasilitas Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer
45. Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan
46. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Salatiga
47. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar
48. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang
49. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya
50. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru
51. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta
52. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta
53. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam
54. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar
55. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado
56. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Medan
57. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang
58. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Ambon
59. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Papua
60. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarnegara
61. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala
62. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Magelang
63. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh
64. Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Baturaja
65. Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pangandaran
66. Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak
67. Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tanah Bumbu

Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

68. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
69. Direktur Pelayanan Klinis
70. Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
71. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan
72. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
73. Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan
74. Kepala Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan
75. Direktur Utama Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta
76. Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
77. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzuki Mahdi Bogor
78. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
79. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta
80. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
81. Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmas Jakarta
82. Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta
83. Direktur Utama Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung
84. Direktur Utama Rumah Sakit Mata Makassar
85. Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
86. Direktur Utama Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
87. Direktur Utama Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
88. Direktur Utama Rumah Sakit Paru dr. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor
89. Direktur Utama Rumah Sakit Paru dr. H.A. Rotinsulu Bandung
90. Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sufiani Saroso Jakarta

91. Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
92. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Ben Mboi Kupang
93. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung
94. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon
95. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
96. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang
97. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang
98. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang
99. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
100. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang
101. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
102. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
103. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
104. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta
105. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan
106. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
107. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta
108. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar
109. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
110. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Ratatotok Buyat
111. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
112. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Ibu Kota Nusantara
113. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya
114. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Makassar
115. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan

Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit

116. Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
 117. Direktur Penyakit Tidak Menular
 118. Direktur Penyakit Menular
 119. Direktur Imunisasi
 120. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
 121. Direktur Kesehatan Lingkungan
 122. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
 123. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang
 124. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap
 125. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Jambi
 126. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Bengkulu
 127. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Bitung
 128. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkal Pinang
 129. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong
 130. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Biak
 131. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Poso
 132. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Yogyakarta
 133. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palangkaraya
 134. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang
 135. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke
 136. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan
 137. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Manokwari
 138. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe
 139. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palu
 140. Kepala Loka Kekarantinaan Kesehatan Entikong
 141. Kepala Loka Kekarantinaan Kesehatan Labuan Bajo
 142. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sampit
 143. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam
 144. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar
 145. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
 146. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan
- Dibaca menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

147. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno Hatta
148. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya
149. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok
150. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pontianak
151. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Semarang
152. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang
153. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Balikpapan
154. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
155. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tanjung Balai Karimun
156. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang
157. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon
158. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh
159. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin
160. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten
161. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai
162. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo
163. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura
164. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Kendari
165. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Kupang
166. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado
167. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram
168. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo
169. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda
170. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tanjung Pinang
171. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan
172. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ternate

Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

173. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
 174. Direktur Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 175. Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 176. Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 177. Direktur Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
 178. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 179. Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi
 180. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta
 181. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto
 182. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar
 183. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang
 184. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Semarang
 185. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Batam
 186. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Mataram
 187. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan
 188. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung
 189. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya
 190. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang
 191. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
 192. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
 193. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar
 194. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
 195. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang
 196. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh
 197. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang
 198. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu
 199. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang
 200. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjung Karang
 201. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar
- Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- 202. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I
- 203. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II
- 204. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta III
- 205. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang
- 206. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak
- 207. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur
- 208. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin
- 209. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado
- 210. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari
- 211. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura
- 212. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
- 213. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Riau
- 214. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi
- 215. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram
- 216. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu
- 217. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku
- 218. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate
- 219. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangkaraya
- 220. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo
- 221. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Pangkal Pinang
- 222. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjung Pinang
- 223. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Mamuju
- 224. Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Sorong

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

- 225. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- 226. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
- 227. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan
- 228. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan
- 229. Kepala Pusat Kebijakan Strategi Dan Tata Kelola Kesehatan Global

Inspektur Jenderal Kemenkes,



Murti Utami

Lampiran 2
Nomor : PS.08.03/G/406/2025
Tanggal : 18 Mei 2025

**KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKAN TAHUN 2025 PER UNIT ESELON I
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
SAMPAI DENGAN 24 APRIL 2025**

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Jumlah Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor		
1	Sekretariat Jenderal	125	125	0	976	974	2	1.101	99,82%
2	Inspektorat Jenderal	171	171	0	85	85	0	256	100,00%
3	Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	584	584	0	38.068	37.153	915	38.652	97,63%
4	Direktorat Jenderal Kesehatan Primer Dan Komunitas	178	178	0	1.688	1685	3	1.866	99,84%
5	Direktorat Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan	75	75	0	741	741	0	816	100,00%
6	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	334	334	0	3.585	3.585	0	3.919	100,00%
7	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	33	33	0	374	374	0	407	100,00%
8	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	477	477	0	8.771	8.768	3	9.248	99,97%
Total		1.977	1.977	0	54.288	53.365	923	56.265	98,36%

Inspektur Jenderal Kemenkes,



Murti Utami

Lampiran 3
 Nomor : PS.08.03/G/406/2025
 Tanggal : 18 Mei 2025

**KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKAN TAHUN 2025 PER UNIT ESELON II/UPT DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
 SAMPAI DENGAN 24 APRIL 2025**

1. Sekretariat Jenderal

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Jumlah Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor		
1	Menkes/ Wakil Menkes/ Staf Ahli Menteri Kesehatan/Staf Khusus	10	10	0	0	0	0	10	100,00%
2	Biro Hukum	4	4	0	44	44	0	48	100,00%
3	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	8	8	0	61	61	0	69	100,00%
4	Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik	4	4	0	48	48	0	52	100,00%
5	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	3	3	0	104	103	1	107	99,07%
6	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	59	59	0	47	47	0	106	100,00%
7	Biro Perencanaan dan Anggaran	4	4	0	73	73	0	77	100,00%
8	Biro Umum	11	11	0	116	116	0	127	100,00%
9	Pusat Data dan Teknologi Informasi	5	5	0	73	73	0	78	100,00%
10	Pusat Kesehatan Haji	5	5	0	40	40	0	45	100,00%
11	Pusat Krisis Kesehatan	4	4	0	45	44	1	49	97,96%
12	Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemenkes	4	4	0	30	30	0	34	100,00%
13	Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan	4	4	0	56	56	0	60	100,00%
14	Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam	0	0	0	239	239	0	239	100,00%
Total		125	125	0	976	974	2	1.101	99,82%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Inspektorat Jenderal

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Jumlah Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor		
1	Sekretariat Inspektorat Jenderal	7	7	0	66	66	0	73	100,00%
2	Inspektorat I	39	39	0	3	3	0	42	100,00%
3	Inspektorat II	37	37	0	3	3	0	40	100,00%
4	Inspektorat III	29	29	0	5	5	0	34	100,00%
5	Inspektorat IV	30	30	0	5	5	0	35	100,00%
6	Inspektorat Investigasi	29	29	0	3	3	0	32	100,00%
Total		171	171	0	85	85	0	256	100,00%

3. Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Jumlah Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor		
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	15	15	0	127	127	0	142	100,00%
2	Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13	13	0	51	51	0	64	100,00%
3	Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan	4	4	0	57	57	0	61	100,00%
4	Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer	4	4	0	47	47	0	51	100,00%
5	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan	6	6	0	51	51	0	57	100,00%
6	Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan	5	5	0	48	48	0	53	100,00%
7	Balai Besar Biomedis Dan Genomika Kesehatan Jakarta	9	9	0	66	66	0	75	100,00%
8	Rumah Sakit Anak Dan Bunda	12	12	0	815	815	0	827	100,00%

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan	Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan		
	Harapan Kita Jakarta								
9	Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta	18	18	0	1200	1194	6	1218	99,51%
10	Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeqi Mahdi Bogor	14	14	0	674	670	4	688	99,42%
11	Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	13	13	0	656	656	0	669	100,00%
12	Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta	12	12	0	348	346	2	360	99,44%
13	Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang	10	10	0	644	644	0	654	100,00%
14	Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta	15	15	0	1288	1263	25	1303	98,08%
15	Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta	9	9	0	255	249	6	264	97,73%
16	Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung	17	17	0	438	438	0	455	100,00%
17	Rumah Sakit Mata Makassar	13	13	0	90	90	0	103	100,00%
18	Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta	10	10	0	504	503	1	514	99,81%
19	Rumah Sakit Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi	13	13	0	474	473	1	487	99,79%
20	Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga	12	12	0	369	369	0	381	100,00%
21	Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu Bandung	18	18	0	415	414	1	433	99,77%
22	Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor	11	11	0	360	360	0	371	100,00%
23	Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta	11	11	0	512	482	30	523	94,26%
24	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Dr. Mahar	15	15	0	824	819	5	839	99,40%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan	Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan		
	Mardjono Jakarta								
25	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Ben Mboi Kupang	8	8	0	260	258	2	268	99,25%
26	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung	21	21	0	2232	2206	26	2253	98,85%
27	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon	14	14	0	415	415	0	429	100,00%
28	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	15	15	0	2467	2413	54	2482	97,82%
29	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang	21	21	0	1656	1648	8	1677	99,52%
30	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang	24	24	0	1833	1832	1	1857	99,95%
31	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang	11	11	0	327	327	0	338	100,00%
32	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta	20	20	0	2200	2198	2	2220	99,91%
33	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang	12	12	0	358	358	0	370	100,00%
34	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	15	15	0	960	960	0	975	100,00%
35	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar	17	17	0	674	565	109	691	84,23%
36	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar	14	14	0	1935	1935	0	1949	100,00%
37	Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta	16	16	0	1805	1588	217	1821	88,08%
38	Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan	12	12	0	1493	1489	4	1505	99,73%
39	Rumah Sakit	16	16	0	3548	3461	87	3564	97,56%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan	Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan		
	Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta								
40	Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta	15	15	0	1463	1363	100	1478	93,23%
41	Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar	14	14	0	1911	1911	0	1925	100,00%
42	Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado	14	14	0	1470	1287	183	1484	87,67%
43	Rumah Sakit Umum Pusat Ratatotok Buyat	14	14	0	113	113	0	127	100,00%
44	Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta	9	9	0	216	215	1	225	99,56%
45	Rumah Sakit Umum Pusat Ibu Kota Nusantara	0	0	0	1	1	0	1	100,00%
46	Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya	0	0	0	166	146	20	166	87,95%
47	Rumah Sakit Umum Pusat Makassar	0	0	0	217	197	20	217	90,78%
48	Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan	3	3	0	35	35	0	38	100,00%
	Total	584	584	0	38.068	37.153	915	38.652	97,63%

4. Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan	Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan		
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	12	12	0	71	71	0	83	100.00%
2	Direktorat Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak	5	5	0	88	88	0	93	100.00%
3	Direktorat Kesehatan Jiwa	7	7	0	39	39	0	46	100.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Jumlah Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor		
4	Direktorat Kesehatan Usia Produktif Dan Lanjut Usia	4	4	0	56	54	2	60	96.67%
5	Direktorat Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	6	6	0	64	63	1	70	98.57%
6	Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat	6	6	0	61	61	0	67	100.00%
7	Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Jakarta	3	3	0	53	53	0	56	100.00%
8	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Salatiga	8	8	0	65	65	0	73	100.00%
9	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru	5	5	0	72	72	0	77	100.00%
10	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta	7	7	0	93	93	0	100	100.00%
11	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar	7	7	0	85	85	0	92	100.00%
12	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang	11	11	0	68	68	0	79	100.00%
13	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya	11	11	0	135	135	0	146	100.00%
14	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta	5	5	0	103	103	0	108	100.00%
15	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Ambon	4	4	0	47	47	0	51	100.00%
16	Balai	4	4	0	30	30	0	34	100.00%

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Jumlah Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor		
	Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh								
17	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarnegara	6	6	0	41	41	0	47	100.00%
18	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam	6	6	0	47	47	0	53	100.00%
19	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala	6	6	0	24	24	0	30	100.00%
20	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Magelang	7	7	0	49	49	0	56	100.00%
21	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar	6	6	0	68	68	0	74	100.00%
22	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado	7	7	0	48	48	0	55	100.00%
23	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Medan	5	5	0	68	68	0	73	100.00%
24	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang	5	5	0	68	68	0	73	100.00%
25	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Papua	5	5	0	26	26	0	31	100.00%
26	Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Baturaja	4	4	0	46	46	0	50	100.00%
27	Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat	6	6	0	23	23	0	29	100.00%

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Jumlah Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor		
	Pangandaran								
28	Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tanah Bumbu	5	5	0	27	27	0	32	100.00%
29	Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	5	5	0	23	23	0	28	100.00%
	Total	178	178	0	1,688	1,685	3	1,866	99.84%

5. Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Jumlah Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor		
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	8	8	0	105	105	0	113	100.00%
2	Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	7	7	0	112	112	0	119	100.00%
3	Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	6	6	0	76	76	0	82	100.00%
4	Direktorat Pengelolaan Imunisasi	6	6	0	67	67	0	73	100.00%
5	Direktorat Penyehatan Lingkungan	5	5	0	58	58	0	63	100.00%
6	Direktorat Surveilans Dan Kekarantinaan Kesehatan	4	4	0	80	80	0	84	100.00%
7	Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam	6	6	0	86	86	0	92	100.00%
8	Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar	5	5	0	106	106	0	111	100.00%
9	Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan	7	7	0	125	125	0	132	100.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan	Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan		
	Makassar								
10	Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan	7	7	0	104	104	0	111	100.00%
11	Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno Hatta	6	6	0	134	134	0	140	100.00%
12	Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya	6	6	0	107	107	0	113	100.00%
13	Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok	8	8	0	113	113	0	121	100.00%
14	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon	6	6	0	53	53	0	59	100.00%
15	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Balikpapan	5	5	0	64	64	0	69	100.00%
16	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh	7	7	0	85	85	0	92	100.00%
17	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung	5	5	0	78	78	0	83	100.00%
18	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin	7	7	0	67	67	0	74	100.00%
19	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten	5	5	0	67	67	0	72	100.00%
20	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap	6	6	0	51	51	0	57	100.00%
21	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai	5	5	0	47	47	0	52	100.00%
22	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo	6	6	0	40	40	0	46	100.00%
23	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura	6	6	0	43	43	0	49	100.00%
24	Balai	6	6	0	50	50	0	65	100.00%

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan	Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan		
	Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Kendari								
25	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Kupang	5	5	0	69	69	0	74	100.00%
26	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado	7	7	0	50	50	0	57	100.00%
27	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram	6	6	0	82	82	0	88	100.00%
28	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang	5	5	0	66	66	0	71	100.00%
29	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang	5	5	0	77	77	0	82	100.00%
30	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang	5	5	0	79	79	0	84	100.00%
31	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru	6	6	0	68	68	0	74	100.00%
32	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pontianak	6	6	0	54	54	0	60	100.00%
33	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo	6	6	0	58	58	0	64	100.00%
34	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda	8	8	0	62	62	0	70	100.00%
35	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Semarang	6	6	0	85	85	0	91	100.00%
36	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tanjung Balai Karimun	5	5	0	44	44	0	49	100.00%
37	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tanjung Pinang	5	5	0	53	53	0	58	100.00%
38	Balai Kekarantinaan	6	6	0	45	45	0	51	100.00%

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan	Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan		
	Kesehatan Kelas I Tarakan								
39	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ternate	5	5	0	52	52	0	57	100.00%
40	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Bengkulu	4	4	0	56	56	0	60	100.00%
41	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Biak	6	6	0	26	26	0	32	100.00%
42	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Bitung	7	7	0	38	38	0	45	100.00%
43	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Jambi	6	6	0	62	62	0	68	100.00%
44	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe	7	7	0	38	38	0	45	100.00%
45	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Manokwari	5	5	0	33	33	0	38	100.00%
46	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke	6	6	0	32	32	0	38	100.00%
47	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palangkaraya	6	6	0	39	39	0	45	100.00%
48	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palu	6	6	0	48	48	0	54	100.00%
49	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkal Pinang	6	6	0	61	61	0	67	100.00%
50	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Poso	4	4	0	45	45	0	49	100.00%
51	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang	6	6	0	25	25	0	31	100.00%
52	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sampit	6	6	0	35	35	0	41	100.00%

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan	Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan		
53	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong	5	5	0	32	32	0	37	100.00%
54	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan	5	5	0	41	41	0	46	100.00%
55	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Yogyakarta	6	6	0	47	47	0	53	100.00%
56	Loka Kekarantinaan Kesehatan Entikong	7	7	0	25	25	0	32	100.00%
57	Loka Kekarantinaan Kesehatan Labuan Bajo	5	5	0	31	31	0	36	100.00%
	Total	334	334	0	3,585	3,585	0	3,919	100.00%

6. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan	Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan		
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan	7	7	0	74	74	0	81	100.00%
2	Direktorat Ketahanan Kefarmasian Dan Alat Kesehatan	5	5	0	60	60	0	65	100.00%
3	Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan	6	6	0	51	51	0	57	100.00%
4	Direktorat Pengelolaan Dan Pelayanan Kefarmasian	8	8	0	71	71	0	79	100.00%
5	Direktorat Produksi Dan Distribusi Alat Kesehatan	7	7	0	65	65	0	72	100.00%
6	Direktorat	4	4	0	52	52	0	56	100.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan	Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan		
	Produksi Dan Distribusi Kefarmasian								
7	Balai Pengamanan Alat Dan Fasilitas Kesehatan Jakarta	9	9	0	85	85	0	94	100.00%
8	Balai Pengamanan Alat Dan Fasilitas Kesehatan Makassar	6	6	0	78	78	0	84	100.00%
9	Balai Pengamanan Alat Dan Fasilitas Kesehatan Medan	5	5	0	58	58	0	63	100.00%
10	Balai Pengamanan Alat Dan Fasilitas Kesehatan Surabaya	5	5	0	73	73	0	78	100.00%
11	Loka Pengamanan Alat Dan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru	6	6	0	25	25	0	31	100.00%
12	Balai Pengamanan Alat Dan Fasilitas Kesehatan Surakarta	7	7	0	49	49	0	56	100.00%
Total		75	75	0	741	741	0	816	100.00%

7. Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan	Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan		
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	8	8	0	115	115	0	123	100.00%
2	Direktorat Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	4	4	0	49	49	0	53	100.00%
3	Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	4	4	0	36	36	0	40	100.00%
4	Direktorat	4	4	0	59	59	0	63	100.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan	Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan		
	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan								
5	Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan	4	4	0	55	55	0	59	100.00%
6	Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan	5	5	0	36	36	0	41	100.00%
7	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto	7	7	0	74	74	0	81	100.00%
8	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta	7	7	0	78	78	0	85	100.00%
9	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar	7	7	0	65	65	0	72	100.00%
10	Balai Pelatihan Kesehatan Batam	6	6	0	33	33	0	39	100.00%
11	Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang	7	7	0	51	51	0	58	100.00%
12	Balai Pelatihan Kesehatan Mataram	4	4	0	29	29	0	33	100.00%
13	Balai Pelatihan Kesehatan Semarang	9	9	0	51	51	0	60	100.00%
14	Poltekkes Kemenkes Aceh	11	11	0	433	433	0	444	100.00%
15	Poltekkes Kemenkes Bandung	15	15	0	362	362	0	377	100.00%
16	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin	12	12	0	188	188	0	200	100.00%
17	Poltekkes Kemenkes Banten	9	9	0	77	77	0	86	100.00%
18	Poltekkes Kemenkes Bengkulu	10	10	0	179	179	0	189	100.00%
19	Poltekkes Kemenkes Denpasar	8	8	0	204	204	0	212	100.00%
20	Poltekkes Kemenkes Gorontalo	10	10	0	134	134	0	144	100.00%
21	Poltekkes Kemenkes Jakarta I	12	12	0	119	119	0	131	100.00%
22	Poltekkes Kemenkes	9	9	0	204	204	0	213	100.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan	Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan		
	Jakarta li								
23	Poltekkes Kemenkes Jakarta Iii	12	12	0	208	208	0	220	100.00%
24	Poltekkes Kemenkes Jambi	8	8	0	196	196	0	204	100.00%
25	Poltekkes Kemenkes Jayapura	10	10	0	181	181	0	191	100.00%
26	Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur	9	9	0	134	134	0	143	100.00%
27	Poltekkes Kemenkes Kendari	11	11	0	133	133	0	144	100.00%
28	Poltekkes Kemenkes Kupang	10	10	0	280	280	0	290	100.00%
29	Poltekkes Kemenkes Makassar	11	11	0	271	271	0	282	100.00%
30	Poltekkes Kemenkes Malang	11	11	0	322	322	0	333	100.00%
31	Poltekkes Kemenkes Maluku	12	12	0	148	147	1	160	99.38%
32	Poltekkes Kemenkes Mamuju	6	6	0	79	79	0	85	100.00%
33	Poltekkes Kemenkes Manado	9	9	0	178	178	0	187	100.00%
34	Poltekkes Kemenkes Mataram	10	10	0	153	153	0	163	100.00%
35	Poltekkes Kemenkes Medan	9	9	0	330	330	0	339	100.00%
36	Poltekkes Kemenkes Padang	14	14	0	219	219	0	233	100.00%
37	Poltekkes Kemenkes Palangkaraya	10	10	0	105	105	0	115	100.00%
38	Poltekkes Kemenkes Palembang	9	9	0	292	292	0	301	100.00%
39	Poltekkes Kemenkes Palu	9	9	0	182	182	0	191	100.00%
40	Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang	8	8	0	79	79	0	87	100.00%
41	Poltekkes Kemenkes Pontianak	11	11	0	233	231	2	244	99.18%
42	Poltekkes Kemenkes Riau	12	12	0	106	106	0	118	100.00%

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan	Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan		
43	Poltekkes Kemenkes Semarang	14	14	0	514	514	0	528	100.00%
44	Poltekkes Kemenkes Sorong	11	11	0	78	78	0	89	100.00%
45	Poltekkes Kemenkes Surabaya	11	11	0	394	394	0	405	100.00%
46	Poltekkes Kemenkes Surakarta	9	9	0	312	312	0	321	100.00%
47	Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang	12	12	0	264	264	0	276	100.00%
48	Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang	6	6	0	62	62	0	68	100.00%
49	Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya	15	15	0	209	209	0	224	100.00%
50	Poltekkes Kemenkes Ternate	7	7	0	110	110	0	117	100.00%
51	Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	11	11	0	282	282	0	293	100.00%
52	Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, Dan Majelis Disiplin Profesi	8	8	0	86	86	0	94	100.00%
Total		477	477	0	8,771	8,768	3	9,248	99.97%

8. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan	Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan		
1	Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	15	15	0	122	122	0	137	100.00%
2	Pusat Kebijakan Kesehatan Global Dan Teknologi Kesehatan	4	4	0	72	72	0	76	100.00%
3	Pusat Kebijakan Pembiayaan Dan Desentralisasi Kesehatan	7	7	0	70	70	0	77	100.00%
4	Pusat Kebijakan	4	4	0	50	50	0	54	100.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan	Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan		
	Sistem Ketahanan Kesehatan Dan Sumber Daya Kesehatan								
5	Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan	3	3	0	60	60	0	63	100.00%
	Total	33	33	0	374	374	0	407	100.00%

Catatan:

- Berdasarkan Tarikan Data dari Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1ajEGwresjeuQD-oqJ_ELSzLlinxu4Dtp?usp=sharing tanggal 24 April 2025 pukul 15.00 WIB.
- Unit Eselon II dan/atau UPT merujuk pada Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2024.

Inspektur Jenderal Kemenkes,



Murti Utami